

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hasibuan, M. S. P. (2020). Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.

Mardiasmo (2019). Perpajakan (Edisi terbaru). Andi. Nazir, M. (2013). Metode penelitian (8th ed.). Ghalia Indonesia.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Sage Publications.

Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal. Rekayasa Sains.

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2021). Management (15th Edition). Pearson Education.

Sari, D. (2016). Konsep dasar perpajakan. Refika Aditama.

Setiawan, B., & Fitriani, P. (2017). Perpajakan Teori dan Praktik. Rajawali Pers

Sugiyono. (2021). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Terry, G. R. (2019). Principles of Management. Richard D. Irwin.

Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. Salemba Empat.

Wulandari. (2019). Perpajakan Jasa Konstruksi di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal :

Arievani, B. P., & Susilawati. (2026). Kepatuhan terhadap peraturan PPh Final jasa konstruksi pada perusahaan konstruksi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 23(2), 147-158.

Bawazir, M. N., Meiriyanti, R., & Utami P., R. H.. (2025). Pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak, sanksi perpajakan, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus pada KPP Pratama Blora). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Ekonomi Kreatif (JIBEKA)*, 4(2), 1-11.

Harjanti, R. S., & Hetika. (2020). Evaluasi pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan pada PT. X. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(3), 130-136.

Ratuela, H. S. P., Sondakh, J. J., & Wangkar, A.. (2018). Analisis penerapan pajak penghasilan final Pasal 4 Ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT. Realita Timur Perkasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 856-866.

Setiadi, S. (2019). PPh final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi (Studi kasus PT. Wijaya Karya Pracetak Gedung, Jakarta). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*, 4(2). <https://doi.org/10.35968/jbau.v4i2.337>

Syaifuddin, R., & Setyowati, L.. (2023). Analisis perhitungan jasa konstruksi berdasarkan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dan PPh Pasal 23 pada CV. Pratama Karya Mandiri. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 1(3), 102-118.

Verry, Y. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di KPP Pratama Binjai.

Tugas Akhir / Skripsi :

Brigida. (2021). Tinjauan pelaksanaan pengawasan kewajiban perpajakan atas usaha jasa konstruksi di KPP Pratama Medan Timur tahun 2020 (Tugas Akhir). Politeknik Keuangan Negara STAN.

Cahyaningtias, A. W.. (2024). Analisis penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas usaha jasa konstruksi pada CV. OPR (Tugas Akhir). Politeknik Negeri Bali.

Pratiwi, N. M. M. (2022). Analisis penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) pada PT CGD (Tugas Akhir). Politeknik Negeri Bali.

Saputra, N. H. (2020). Tinjauan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas usaha jasa konstruksi dalam rangka kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Ponorogo (Tugas Akhir). Politeknik Keuangan Negara STAN.

Wahyuni, S. (2020). Tinjauan pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas usaha jasa konstruksi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan (Tugas Akhir). Politeknik Keuangan Negara STAN.

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas PMK Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.